

PENGARUH PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH DAN SISTEM AKUNTANSI KEUANGAN DAERAH TERHADAP KUALITAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH

Siska Yulia Defitri

Fakultas Ekonomi, Universitas Mahaputra Muhammad Yamin

siskayd023@gmail.com

Abstract

This study aims to examine the influence of local financial management and regional financial accounting system to the quality of local government financial statements. This research belongs to causative research conducted at regional apparatus organization in Solok City. Data collection is done by survey method through questionnaires distributed to respondents who are in finance or accounting department. The result of the research shows that the management of regional finance has positive correlation but it has no significant effect to the quality of local financial report, while the financial accounting system has significant effect on the quality of local government financial report. This shows that the better the local financial accounting system, the resulting financial statements will also increase.

Keywords: *Financial Management; Accounting System; Regional Finance; Quality Report*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Penelitian ini tergolong penelitian kausatif yang dilakukan pada organisasi perangkat daerah di Kota Solok. Pengambilan data dilakukan dengan metode survei melalui penyebaran kuesioner kepada responden yang berada pada bagian keuangan atau akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah memiliki hubungan yang positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah, sedangkan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh secara signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah maka laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin meningkat.

Kata kunci: *Pengelolaan Keuangan; Sistem Akuntansi; Keuangan Daerah; Kualitas Laporan*

Detail Artikel :

Diterima : 11 Januari 2017

Disetujui : 27 Januari 2017

[DOI :10.22216/jbe.v2i3.2376](https://doi.org/10.22216/jbe.v2i3.2376)

PENDAHULUAN

Latar Belakang Masalah

Tata kelola pemerintahan yang baik adalah sebuah bentuk keberhasilan dalam menjalankan tugas untuk membangun negara sesuai dengan tujuan yang telah direncanakan. Hal ini dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan terutama dalam hal pelaksanaan perekonomian negara. Pemerintah daerah selaku pengelola dana publik harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan secara akurat, relevan, tepat waktu dan dapat dipercaya sehingga dituntut untuk memiliki sistem informasi yang handal.

Laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas berupa informasi keuangan. Informasi yang seharusnya disajikan dalam pelaporan keuangan pemerintah daerah hendaknya sesuai dengan yang dibutuhkan oleh *stakeholder* (Defitri, 2014), untuk itu aparat pemerintah harus dapat

mengetahui anggaran pemerintah daerahnya agar tidak terjadi informasi asimetris dalam pengelolaan keuangan daerah (Defitri, Yulistia, Apriyeni, & Eliza, 2016).

Kualitas informasi akuntansi yang disajikan dalam bentuk laporan dapat digunakan sebagai dasar pembuatan keputusan maka, harus didukung oleh kualitas aparatur pemerintah daerah di bidang pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah agar kualitas informasi akuntansi yang dihasilkan andal dan akurat. Laporan keuangan yang berkualitas tentu diperlukan prosedur pelaporan keuangan yang baik sesuai dengan peraturan pelaporan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara optimal Untuk menyediakan informasi keuangan yang dibutuhkan, implementasi sejumlah perangkat perundang-undangan di bidang pemerintahan daerah belum bisa dijadikan acuan utama dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, khususnya di bidang pengelolaan keuangan daerah dan pelayanan publik, tetapi masih membutuhkan pengkajian yang lebih mendalam, khususnya menyangkut pengelolaan keuangan daerah dan mengenai sistem akuntansi keuangan daerah serta manajemen atau dalam kaitannya dengan pelayanan publik.

Keseluruhan kegiatan pengelolaan keuangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, pemerintah daerah menetapkan tujuan dan sasaran dan kemudian membuat rencana kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut. Pengelolaan keuangan daerah perlu ditunjang oleh pemahaman sistem akuntansi keuangan daerah agar penatausahaan keuangan di daerah memiliki akurasi dan akuntabilitas yang tinggi. Sistem akuntansi keuangan daerah yang memadai dapat memberikan bantuan untuk memverifikasi transaksi-transaksi agar dapat ditelusuri dana-dana sesuai dengan tujuannya, serta mengecek otoritas, efisiensi, dan keabsahan pembelajaan dana.

Melihat pentingnya peranan dalam pengelolaan dan aturan yang jelas dalam penyusunan laporan keuangan daerah dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Tinjauan Pustaka dan Pengembangan Hipotesis Pengelolaan Keuangan Daerah

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut (UU No. 17, 2003). Untuk dapat menjalankan pemerintahan daerah dengan segala aspek keuangan yang terdapat didalamnya maka setiap kepala daerah harus dapat melakukan pengelolaan keuangan daerah yang baik sesuai dalam permendagri No. 13 tahun 2006 tentang Pedoman pengelolaan keuangan daerah, yang menjelaskan bahwa pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah (Permendagri No. 13, 2006).

Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat, yang dimaksud secara tertib adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Artinya pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundangan dan efektif serta efisien maka akan dapat menghasilkan suatu pelaporan yang baik dan taat dengan ketentuan karena didukung dengan bukti-bukti yang kuat.

Suatu pengelolaan berkaitan erat dengan pengendalian internal, sistem pengendalian yang lemah akan mempengaruhi pendapat audit dalam laporan keuangan (Nugraheni & Subaweh, 2008). Salah satu bagian didalam pengendalian intern adalah informasi dan

komunikasi serta pemantauan, didalam instansi tentu memerlukan informasi komunikasi apalagi pemantauan agar menjalankan pengelolaan organisasi terutama keuangan akan dapat mencapai hasil sesuai dengan tujuan. Herawati (Herawati, 2014) menjelaskan bahwa informasi dan komunikasi serta pemantauan berpengaruh secara langsung terhadap kualitas laporan keuangan. Dengan demikian maka komunikasi dan pemantauan merupakan proses dari pencapaian suatu pengelolaan yang baik. Implementasi pedoman pengelolaan keuangan yang diikuti dengan pemahaman yang baik dari semua pegawai yang terlibat akan mampu melahirkan laporan keuangan yang berkualitas sebagai wujud pertanggungjawaban pengelolaan keuangan (Ovita & Husaini, 2013).

Menurut Chabib sholeh (2010;10) prinsip-prinsip pengelolaan keuangan yang diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah meliputi:

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas, mensyaratkan bahwa dalam mengambil suatu keputusan hendaknya berperilaku sesuai dengan mandat yang diterimanya. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan baik, yang mencakup kerugian daerah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

2. *Value for money*

Indikasi keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi adalah terjadinya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat yang semakin baik, kehidupan demokrasi yang semakin maju, keadilan, pemerataan serta adanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah. Keadilan tersebut hanya akan tercapai apabila penyelenggaraan pemerintahan daerah dikelola dengan memperhatikan konsep *value for money*, prinsip ini dioperasionalkan dalam pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien.

3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik

Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi, sehingga kesempatan untuk korupsi dapat diminimalkan, yang mencakup potensi kerugian daerah adalah suatu perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai yang dapat mengakibatkan risiko terjadinya kerugian di masa yang akan datang berupa berkurangnya uang, surat berharga, dan pasti jumlahnya.

4. Transparansi

Transparansi merupakan keterbukaan pemerintah dalam membuat kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat. Transparansi pengelolaan keuangan daerah pada akhirnya akan menciptakan *horizontal accountability* antara pemerintah daerah dengan masyarakatnya sehingga tercipta pemerintah daerah yang bersih, efektif, efisien, akuntabel, responsif terhadap aspirasi dan kepentingan masyarakat, yang mencakup administrasi temuan mengungkap adanya penyimpangan terhadap ketentuan yang berlaku baik dalam pelaksanaan anggaran atau pengelolaan aset, tetapi penyimpangan tersebut tidak mengakibatkan kerugian daerah atau potensi kerugian daerah, tidak mengurangi hak daerah kekurangan penerimaan, tidak menghambat program entitas, dan tidak mengandung unsur indikasi tindak pidana.

5. Pengendalian

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus sering dievaluasi yaitu dibandingkan antara yang dianggarkan dengan yang dicapai. Untuk itu perlu dilakukan analisis varians selisih terhadap pendapatan dan belanja daerah agar dapat

sesegera mungkin dicari penyebab timbulnya varians untuk kemudian dilakukan tindakan antisipasi ke depan, yang mencakup kekurangan penerimaan kerugian daerah adalah berkurangnya kekayaan daerah berupa uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Prinsip-prinsip pengelolaan keuangan diperlukan untuk mengontrol kebijakan keuangan daerah. Kebijakan yang dihasilkan harus dapat diakses dan dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal dengan pengelolaan keuangan daerah dan anggaran daerah dengan ekonomis, efektif, dan efisien. Pengelolaan keuangan daerah harus dipercayakan kepada staf yang memiliki integritas dan kejujuran yang tinggi terhadap mandat yang telah diberikan dalam hal pengelolaan keuangan daerah dan keterbukaan terhadap kebijakan-kebijakan keuangan daerah sehingga dapat diketahui dan diawasi oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) maupun masyarakat serta dapat dibandingkan antara anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dianggarkan dengan yang dicapai.

Berdasarkan referensi yang digunakan diatas maka hipotesis yang dapat digambarkan adalah:
H1 : Pengelolaan keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan daerah.

Sistem Akuntansi Keuangan Daerah

Dalam menghasilkan laporan yang berkualitas maka setiap entitas harus membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang diterima umum atau dalam internasional dikenal dengan *International Accounting Standards Board* (IASB) yang sekarang disebut dengan *International Financial Reporting Standar* (IFRS) (Iatridis, 2010) sebagai prasyarat dalam menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dalam perusahaan. Sama halnya dengan perusahaan, pemerintah juga harus dapat menghasilkan laporan keuangan dengan mengacu standar yang berlaku dalam pemerintahan agar menghasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan baik (Nugraheni & Subaweh, 2008)

Oleh karena itu anggaran yang dibuat oleh pemerintah pusat maupun daerah haruslah dapat memenuhi keinginan masyarakat, karena bagaimanapun pemerintah merupakan pelayan masyarakat, hal ini disebabkan oleh peran penting dalam mewujudkan optimalisasi pelayanan pemerintahan kepada masyarakat merupakan tujuan penting dari keberadaan organisasi pemerintah (Siswadhi, 2017). Dengan demikian pemerintah ataupun pemerintah daerah harus dapat merencanakan dan menyelenggarakan program-program kerja yang tujuan akhirnya adalah menciptakan kepuasan masyarakat yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) dan akan dipertanggungjawabkan dalam bentuk laporan keuangan.

Selain itu hal yang mendasar dan dianggap penting dalam penerapan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan daerah salah satunya adalah sistem akuntansi (Roviyantie, 2011). Setiap entitas pelaporan dan entitas akuntansi harus dapat menyelenggarakan sistem akuntansi pemerintahan daerah sesuai dengan standar akuntansi yang ditetapkan oleh Pemerintah yaitu Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah meliputi serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer (Permendagri No. 13, 2006). Tujuan sistem akuntansi pemerintah adalah sebagai pedoman dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah dengan dasar hukum yang dimulai dari UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara sampai PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Kegunaan sistem akuntansi keuangan daerah dapat memenuhi tuntutan masyarakat dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga publik (Latifah & Sabeni, 2007). Hal ini disebabkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah merupakan sistem yang mendokumentasikan, serta mengolah keuangan daerah dan data terkait mulai dari proses

pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan menjadi informasi keuangan yang disajikan kepada masyarakat dan sebagai bahan pengambilan keputusan dalam rangka perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pertanggungjawaban. Dengan menggunakan sistem akuntansi, maka resiko akan terjadinya suatu kekeliruan dan kesalahan dapat diminimalisir dalam pencatatan atau perhitungan yang dapat memungkinkan pemerintah daerah mengalami resiko yang lebih berat (Herawati, 2014).

Sistem akuntansi keuangan daerah merupakan salah satu sub sistem organisasi yang memfasilitasi kontrol dengan melaporkan kinerja pemerintah daerah. Ruang lingkup sistem akuntansi keuangan daerah mencakup kebijakan sistem akuntansi, prosedur sistem akuntansi, sumber daya manusia, dan teknologi informasi (Ratifah & Ridwan, 2012) dan menunjukkan hasil bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu juga hasil penelitian Wati dkk (Wati, Herawati, & Sinarwati, 2014) yang memberikan informasi bahwa sistem akuntansi keuangan daerah memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, dengan demikian jika sistem keuangan daerah diterapkan dengan baik dari awal maka kualitas laporan keuangan yang dihasilkan juga akan semakin lebih baik (Roviyantie, 2011).

Sistem akuntansi keuangan daerah erat kaitannya dengan prosedur pengukuran, pencatatan, penggolongan dan pelaporan akuntansi dalam rangka pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) pada periode tertentu untuk mengambil langkah masa depan pemerintah daerah. Jika sistem akuntansi keuangan daerah dalam dilaksanakan sesuai dengan ketentuan maka laporan keuangan yang akan dihasilkan juga akan jadi lebih baik dan berkualitas.

Hipotesis dua yang dapat dikembangkan berkaitan dengan sistem akuntansi keuangan daerah dalam penelitian ini adalah :

H2 : Sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah

Kualitas Laporan Keuangan Daerah

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan (PP No. 71, 2010) dan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Sedangkan tujuan umum laporan keuangan yaitu menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Kualitas atau mutu dapat dinilai dengan tingkat baik buruknya atau taraf atau derajat sesuatu. Sehingga karakteristik kualitatif harus dipenuhi dalam suatu laporan keuangan agar dapat dinilai sebagai laporan keuangan yang berkualitas. Adapun karakteristik kualitatif dari suatu laporan keuangan adalah sebagai berikut (UU No. 17, 2003):

1. Relevan

Relevan dalam laporan keuangan apabila informasi yang termuat di dalamnya dapat mempengaruhi keputusan pengguna dari mengevaluasi peristiwa masa lalu atau masa kini dan memprediksi masa depan. Dengan demikian, informasi laporan keuangan yang relevan dapat dihubungkan dengan maksud penggunaannya. Informasi yang relevan berikut ini:

- a. Memiliki manfaat umpan balik (*feedback value*), Informasi memungkinkan pengguna untuk menegaskan atau mengoreksi ekspektasi mereka di masa lalu.

- b. Memiliki manfaat prediktif (*predictive value*), Informasi dapat membantu pengguna untuk memprediksi masa yang akan datang berdasarkan hasil masa lalu dan kejadian masa kini.
- c. Tepat waktu, Informasi disajikan tepat waktu sehingga dapat berpengaruh dan berguna dalam pengambilan keputusan.
- d. Lengkap, Informasi akuntansi keuangan pemerintah disajikan selengkap mungkin, mencakup semua informasi akuntansi yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan dengan memperhatikan kendala yang ada. Informasi yang melatar belakangi setiap butir informasi utama yang termuat dalam laporan keuangan diungkapkan dengan jelas agar kekeliruan dalam penggunaan informasi tersebut dapat dicegah.

2. Andal

Informasi dalam laporan keuangan bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material, menyajikan setiap fakta secara jujur, serta dapat diverifikasi. Informasi mungkin relevan tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Informasi yang andal memenuhi karakteristik:

a. Penyajian Jujur

Informasi menggambarkan dengan jujur transaksi serta peristiwa lainnya yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar dapat diharapkan untuk disajikan.

b. Dapat Diverifikasi (*verifiability*)

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat diuji, dan apabila pengujian dilakukan lebih dari sekali oleh pihak yang berbeda, hasilnya tetap menunjukkan simpulan yang tidak berbeda jauh.

c. Netralitas

Informasi diarahkan pada kebutuhan umum dan tidak berpihak pada kebutuhan pihak tertentu.

3. Dapat dibandingkan

Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya. Perbandingan dapat dilakukan secara internal dan eksternal. Perbandingan secara internal dapat dilakukan bila suatu entitas menerapkan kebijakan akuntansi yang sama dari tahun ke tahun. Perbandingan secara eksternal dapat dilakukan bila entitas yang diperbandingkan menerapkan kebijakan akuntansi yang sama. Apabila entitas pemerintah menerapkan kebijakan akuntansi yang lebih baik daripada kebijakan akuntansi yang sekarang diterapkan, perubahan tersebut diungkapkan pada periode terjadinya perubahan.

4. Dapat dipahami

Informasi yang disajikan dalam laporan keuangan dapat dipahami oleh pengguna dan dinyatakan dalam bentuk serta istilah yang disesuaikan dengan batas pemahaman para pengguna. Untuk itu, pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai atas kegiatan dan lingkungan operasi entitas pelaporan, serta adanya kemauan pengguna untuk mempelajari informasi yang dimaksud dalam laporan keuangan.

Suatu laporan keuangan dapat memberi manfaat bagi para pemakainya maka laporan keuangan tersebut harus mempunyai nilai informasi yang berkualitas dan berguna dalam pengambilan keputusan. Laporan keuangan yang berkualitas menunjukkan bahwa kepala daerah bertanggungjawab sesuai dengan wewenang yang dilimpahkan kepadanya dalam pelaksanaan tanggung jawab mengelola organisasi. Laporan keuangan menyajikan informasi yang digunakan dalam pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik serta berbagai bukti pertanggungjawaban dan pengelolaan untuk mengevaluasi kinerja organisasi serta kesesuaian

dengan peraturan perundang-undangan yang menjadi pedoman dalam pembuatan laporan keuangan.

Hipotesis yang dapat mendukung peningkatan kualitas laporan keuangan yang dapat diuji adalah sebagai berikut :

H3 : Pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan daerah

METODE PENELITIAN

Objek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Solok. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan pendekatan deskriptif, selain itu metode penelitian yang dilakukan yaitu dengan metode survei yang bersifat kausalitas yaitu menjelaskan hubungan antar variabel berdasarkan konstruk model penelitian.

Penelitian ini menggunakan data primer yang diperoleh langsung dari sumbernya dengan menyebarkan kuesioner kepada responden yang terkait dengan tujuan penelitian ini. kuesioner menggunakan skala likert dengan menggunakan skor 5 (lima) point. Teknik pengumpulan data menggunakan penelitian lapangan (*Field Research*). Populasi dalam penelitian ini adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang ada di lingkungan Pemerintahan Kota Solok yang berjumlah 30 (Tiga Puluh) OPD, teknik sampling yang digunakan dengan metode sensus dimana semua populasi menjadi sampel penelitian. Sedangkan yang menjadi responden dalam penelitian ini adalah bagian keuangan atau bagian akuntansi di organisasi perangkat daerah.

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

Variabel	Konsep dan Defenisi Operasional	Indikator
Kualitas Laporan Keuangan (Y)	ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami
Pengelolaan Keuangan Daerah (X1)	Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Akuntabilitas 2. <i>Value for money</i> 3. Kejujuran dalam mengelola keuangan publik 4. Transparansi 5. Pengendalian
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah (X2)	serangkaian prosedur mulai dari proses pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang dapat dilakukan secara manual atau menggunakan aplikasi komputer.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pencatatan 2. Penggolongan dan pengikhtisaran 3. Pelaporan

Teknik analisis yang penulis gunakan dengan melalui beberapa pengujian, uji instrumen dilakukan diawal dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. kuesioner yang telah diisi oleh responden dikuantitatifkan terlebih dahulu sehingga menghasilkan keluaran-keluaran berupa angka yang selanjutnya dianalisis melalui program *Statistical Package for Social Science* (SPSS). Uji validitas dilakukan dengan cara melihat korelasi skor masing-masing item

pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya. Penelitian ini menggunakan *Corrected Item-Total Correlation* yaitu dengan menghitung korelasi skor masing-masing item pernyataan dalam kuesioner dengan skor totalnya sedangkan untuk menguji reliabilitas kuesioner digunakan teknik *Cronbach Alpha*.

Untuk pengujian lebih lanjut maka pengujian harus memenuhi beberapa asumsi yang disebut uji asumsi klasik yaitu hasil perhitungan yang dapat diinterpretasikan dengan akurat terdiri dari uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Uji hipotesis menggunakan analisis regresi linear berganda bertujuan untuk mencari pengaruh Pengelolaan Keuangan Daerah (X1), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah (Y). Model regresi linear berganda yang digunakan adalah (Sugiyono, 2013:192):

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

Keterangan

- Y = Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
- α = *Intercept*
- $\beta_1 \beta_2$ = Koefisien regresi
- X₁ = Pengelolaan keuangan daerah
- X₂ = Sistem akuntansi keuangan daerah
- ε = *Error terms*

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari 60 kuesioner yang disebarkan kepada responden maka diperoleh tingkat respon (*respond rate*) adalah 84,78% yang berarti pengujian layak untuk dilanjutkan. Dari hasil uji instrumen yang pertama yaitu uji validitas diketahui semua variabel dinyatakan valid karena didapatkan nilai *Corrected Item-Total Correlation* lebih besar dari nilai r tabel yaitu 0,316 dengan taraf signifikan 5%. Sedangkan uji reliabilitas diperoleh hasil *Cronbach's Alpha* > 0,60. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa variabel pengelolaan keuangan daerah, sistem akuntansi keuangan daerah dan kualitas laporan keuangan daerah hasilnya reliabel sehingga dapat dikatakan layak digunakan sebagai alat ukur dan dapat dilakukan analisis lebih lanjut, hasilnya dapat dilihat dari tabel berikut ini:

Tabel 2. Hasil Uji Reliabilitas

Nama Variabel	<i>Cronbach's Alpha</i>	Keterangan
Pengelolaan Keuangan Daerah	0,739	Reliabel
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	0,802	Reliabel
Kualitas Laporan Keuangan Daerah	0,749	Reliabel

Sumber: Hasil Penelitian, 2017

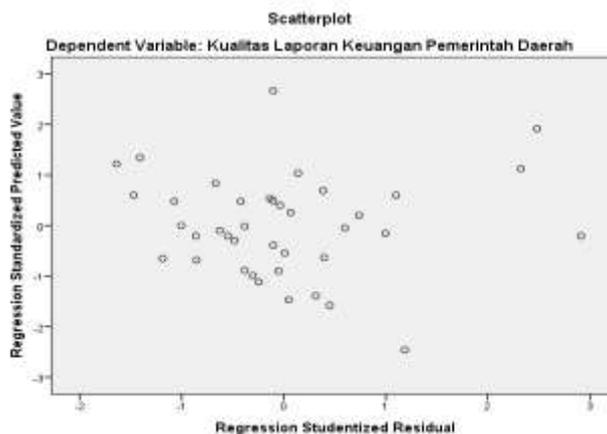
Untuk mendeteksi apakah residual yang digunakan tersebut berdistribusi normal maka dideteksi dengan melihat penyebaran data titik pada sumbu diagonal dan grafik. Jika data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bahwa data menyebar sekitar garis diagonal dan mengikuti arah garis diagonal, dengan demikian model regresi layak dipakai dalam penelitian ini karena memenuhi asumsi normalitas.

Untuk menguji adanya multikolinearitas dapat dilihat melalui nilai *Variance Inflation Factor (VIF)*. Apabila nilai VIF > 10 maka dikatakan terdapat gejala multikolinearitas, dan jika nilai VIF < 10 maka tidak terjadi multikolinearitas. Dari hasil pengujian diketahui bahwa nilai *tolerance* semua variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi

keuangan daerah adalah $0,991 > 0,10$ dan nilai VIF adalah $1,009 < 10$, dengan demikian dapat dikatakan, tidak terdapat hubungan antara variabel pengelolaan keuangan daerah dengan variabel sistem akuntansi keuangan daerah.

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian atau jenis residual atau jenis residual satu pengamatan lainnya. Adapun cara memprediksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat pada gambar *scatterplot* berikut:

Gambar 1. Hasil Uji Heteroskedastisitas



Sumber : Output SPSS versi 24.0

Setelah dilakukan pengujian, terlihat dari gambar *scatterplot* pada grafik di atas terlihat bahwa titik – titik menyebar secara acak serta tersebar baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas dalam artian bahwa jenis atau varian residual variabel dependen yaitu kualitas laporan keuangan daerah memiliki jenis atau varian residual yang sama dengan variabel independen yaitu pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah. Sehingga penelitian ini dapat untuk diteliti lebih lanjut.

Uji regresi linear berganda bertujuan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah positif atau negatif. Hasil uji regresi linear berganda dapat dilihat pada tabel 3 dibawah ini :

Tabel 3. Hasil Uji Regresi Linier Berganda

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	10,154	9,144		1,110	,274
Pengelolaan Keuangan Daerah	,106	,167	,086	,636	,529
Sistem Akuntansi Keuangan Daerah	,563	,133	,573	4,225	,000

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

Dari hasil persamaan regresi linear berganda diatas dapat dibuatkan persamaan sebagai berikut :

$$Y = 10,154 + 0,106 X_1 + 0,563 X_2 + \epsilon$$

Dari persamaan tersebut dapat dijelaskan bahwa:

- a. Nilai konstanta bernilai positif sebesar 10,154. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai variabel pengelolaan keuangan daerah (X_1) dan sistem akuntansi keuangan daerah

- (X2) sama dengan nol atau bernilai tetap, maka nilai kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (Y) akan bernilai sebesar 10,154
- b. Nilai koefisien pengelolaan keuangan daerah (X1) bernilai positif sebesar 0,106. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai pengelolaan keuangan daerah ditingkatkan maka dan sistem akuntansi keuangan daerah (X2) bernilai nol maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat
 - c. Nilai koefisien sistem akuntansi keuangan daerah (X2) bernilai positif sebesar 0,563. Hal ini menunjukkan bahwa jika nilai sistem akuntansi keuangan daerah meningkat dan variabel pengelolaan keuangan daerah (X1) tidak ada maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan meningkat.

Untuk pengujian hipotesis, penulis menggunakan uji t (parsial) dan uji F (uji simultan). Uji uji parsial bisa dilihat dari tabel 2 diatas yang menunjukkan bahwa :

- a. Variabel Pengelolaan Keuangan Daerah (X1) diperoleh nilai t-hitung sebesar $0,636 < 2,028$ dan dengan signifikansi sebesar $0,529 > 0,05$, nilai t-hitung yang lebih kecil dari t-tabel dan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hipotesis H1 ditolak. Hasil penelitian bertolak belakang dengan penelitian Ovita & Husaini yang menjelaskan bahwa implementasi pengelolaan keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan di lingkungan sekretariat KPU Se-Provinsi Bengkulu (Ovita & Husaini, 2013)

Ketidaksignifikan pengelolaan keuangan daerah terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah disebabkan ada faktor lain tentang pelaporan keuangan yang tidak dijelaskan dalam prinsip-prinsip pengelolaan keuangan daerah yang hanya menjelaskan suatu kebijakan yang dihasilkan harus dapat dikomunikasikan secara vertikal maupun horizontal, memiliki integritas yang tinggi sehingga perlu dilakukan evaluasi antara APBD yang dianggarkan dengan yang dicapai untuk meminimalisir terjadinya korupsi.

- b. Variabel sistem akuntansi keuangan daerah (X2) diperoleh nilai t-hitung sebesar $4,225 > 2,028$ dan dengan signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$, Nilai t-hitung yang lebih besar dari t-tabel dan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hasil hipotesis H2 dapat diterima.

Hasil penelitian sejalan dengan penelitian lain yang menginformasikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Begitu (Ratifah & Ridwan, 2012). Selain itu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan daerah (Wati et al., 2014; Yuliani, Nadirsyah, & Bakar, 2010).

Ini menunjukkan bahwa semakin baik sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola sesuai dengan prosedur mulai dari proses pencatatan, pengiktisaran dan pengolnggan dengan melakukan posting jurnal ke dalam buku besar sesuai nomor perkiraan yang telah ditetapkan pemerintah sampai dengan laporan keuangan maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah akan tercapai. Sistem akuntansi keuangan daerah yang dikelola secara optimal dapat memberikan dukungan yang kuat terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah.

Sementara Uji Simultan dapat dilihat dari hasil uji dari tabel 4 di bawah ini :

Tabel 4. Hasil Uji Simultan

ANOVA ^a					
Model	Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1 Regression	197,192	2	98,596	9,461	,000 ^b
Residual	375,167	36	10,421		
Total	572,359	38			

a. Dependent Variable: Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah
 b. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

Hasil pengolahan Anova diatas terlihat bahwa nilai F-hitung lebih besar dari F-tabel sebesar 9,461 > 3,259 dengan tingkat signifikan sebesar 0,000 < 0,05. Nilai F-hitung yang lebih besar dari F-tabel dan nilai signifikan yang lebih kecil dari 0,05 menunjukkan bahwa Pengelolaan Keuangan Daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah secara simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah sehingga hasil hipotesis H3 dapat diterima.

Uji koefisien determinasi perlu digunakan untuk menunjukkan seberapa besar presentase variasi dalam variabel diperlukan yang dapat dijelaskan oleh variasi dalam variabel independen. Jika R² semakin mendekati satu, maka semakin besar variasi dalam variabel independen. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,587 ^a	,345	,308	3,228

a. Predictors: (Constant), Sistem Akuntansi Keuangan Daerah, Pengelolaan Keuangan Daerah

Berdasarkan tabel diatas dapat dilihat bahwa koefisien determinasi yang ditunjukkan dari nilai R Square koefisien determinasi sebesar 0,345 atau (34,5%). Hal ini menunjukkan besar kontribusi variabel independen terhadap perubahan variabel dependen adalah sebesar 34,5 % sedangkan sisanya 65,5 % dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini seperti pemahaman akuntansi, pemanfaatan sistem informasi keuangan daerah, standar akuntansi pemerintah dan peran internal audit (Yuliani et al., 2010) dan Sistem Pengendalian Internal (Herawati, 2014).

SIMPULAN

Setelah dilakukan pembahasan mengenai pengaruh pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah terhadap kualitas laporan pemerintah daerah di pemerintah daerah se-Kota Solok, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap Kualitas Laporan Keuangan pemerintah daerah, hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan sesuai dengan peraturan dan ketetapan pemerintah belum tentu dapat menjamin bagusnya kualitas laporan keuangan pemerintah suatu daerah.

Sementara itu sistem akuntansi keuangan daerah berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hal ini sesuai dengan hipotesis penelitian, dan membuktikan bahwa sistem akuntansi keuangan daerah yang berjalan efektif akan menghasilkan informasi laporan keuangan yang berkualitas. Secara simultan pengelolaan keuangan daerah dan sistem akuntansi keuangan daerah juga berpengaruh terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan daerah.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terimakasih tidak terhingga kepada keluarga dan sahabat, dan Bapak/Ibu dosen yang mendukung studi dan memotivasi penulisan artikel ini terutama ibu Sefli. Seterusnya segenap jajaran pimpinan Universitas Mahaputra Muhammad Yamin yang telah memberikan kesempatan dan peluang untuk meningkatkan akademik untuk peningkatan diri dan Perguruan Tinggi.

DAFTAR PUSTAKA

- Chabib Soleh. (2010). *Pengelolaan Keuangan dan aset Daerah Bandung*. Fokus Media
- Defitri, S. Y. (2014). Eksplorasi Kebutuhan Stakeholder Terhadap Informasi Dalam Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Media Ekonomi*, 22(1), 53–72.
- Defitri, S. Y., Yulistia, Apriyeni, D., & Eliza. (2016). The Effect Knowledge of Budget and Job Relevant Information on Asymmetry Information. *European Academic Research*, IV(6), 5377–5395.
- Herawati, T. (2014). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *STAR-Study & Accounting Research*, XI(1), 1–14.
- Iatridis, G. (2010). International Review of Financial Analysis International Financial Reporting Standards and the quality of financial statement information. *International Review of Financial Analysis*, 19(3), 193–204. <http://doi.org/10.1016/j.irfa.2010.02.004>
- Latifah, L., & Sabeni, A. (2007). Faktor Keprilakukan Organisasi Dalam Implementasi Sistem Akuntansi Keuangan Daerah. *Simposium Nasional Akuntansi X, ASPP-13*, 1–30.
- Nugraheni, P., & Subaweh, I. (2008). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Jurnal Ekonomi Bisnis*, 13(1), 48–58.
- Ovita, C., & Husaini, A. (2013). Jurnal Fairness. *Jurnal Fairness*, 3(3), 82–94.
- Permendagri No. 13. Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (2006).
- PP No. 71. (2010). *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*.
- Ratifah, I., & Ridwan, M. (2012). Komitmen Organisasi Memoderasi Pengaruh Sistem Akuntansi Keuangan Daerah terhadap Kualitas Laporan Keuangan. *Trikonomika*, 11(1), 29–39.
- Roviyantie, D. (2011). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia dan Penerapan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *Journal.Unsil.ac.id*, (2), 1–27.
- Siswadhi, F. (2017). Pengaruh Pengembangan Karir dan Kepemimpinan Terhadap Kepuasan Kerja Pegawai Pada Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan Kota Sungai Penuh. *Jurnal Benefita*, 2(1), 72–80.
- Sugiyono. (2013). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta.
- UU No. 17. Tentang Keuangan Negara (2003).
- Wati, K. D., Herawati, N. T., & Sinarwati, N. K. (2014). Pengaruh Kompetensi SDM, Penerapan SAP, dan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Daerah. *E-Journal SI Ak Universitas Pendidikan Ganesha*, 2(1), 1–11.
- Yuliani, S., Nadirsyah, & Bakar, U. (2010). Pengaruh Pemahaman Akuntansi, Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah dan Peran Internal Audit Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi pada Pemerintah Kota Banda Aceh). *Jurnal Telaah & Riset Akuntansi*, 3(2), 2–17.